

TUGAS DAN FUNGSI WILAYATUL HISBAH DALAM PENEGAKAN SYARIAT ISLAM DI ACEH TAMIANG

(Studi Qanun No. 13 Tahun 2003 Tentang Maisir)

S K R I P S I

Diajukan oleh:

JHONI AKBAR

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri
Zawiyah Cot Kala Langsa
Fakultas Syari'ah
Jurusan/Prodi Ahwal Asy-Syakhsiyah
No. Pokok: 521100357**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
1436 H / 2015 M**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : JHONI AKBAR
No. Pokok : 521100357
Fakultas/ Jurusan/Prodi : Syari'ah/Ahwal Asy-Syakhsiyah
Program : Strata Satu (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri; tidak merupakan hasil pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Langsa, 7 Mei 2015

Yang Membuat Pernyataan

JHONI AKBAR

S K R I P S I

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa untuk
Melengkapi Tugas dan Memenuhi Sebagian dari Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Ahwal Asy-Syakhsiyah

Diajukan oleh

JHONI AKBAR

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri
Zawiyah Cot Kala Langsa
Fakultas Syari'ah
Jurusan/Prodi Ahwal Asy-Syakhsiyah
No. Pokok: 521100357

Disetujui oleh:

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Drs. Muzakir Samidan,SH.MH

Drs.M.Natsir,SH.MH

Telah dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Skripsi sebagai Salah satu Beban
Studi dalam Menyelesaikan Program
Studi S-1 pada Ilmu Ahwal Asy-Syakhsiyah

Langsa, 03 Juni 2015 M
20 Sya'ban 1436 H

Dewan Penguji:

Drs.Muzakir Samidan, SH.MH
Ketua

Azwir, MA
Sekretaris

H.Muhammad Nasir, MA
Anggota

Muhammad Rusdi,Lc.MA
Anggota

MENGETAHUI,
Dekan Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa

Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

ABSTRAK

Berdasarkan keputusan gubernur Provinsi nanggroe aceh darussalam nomor 01 tahun 2004 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja wilayahul hisbah, didalam pasal 4 Wilayahul hisbah mempunyai tugas dan fungsi (1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syariat islam (2) Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan di bidang syari'at islam (3) Pada saat tugas pembinaan mulai dilakukan, muhtasib perlu memberitahukan hal itu kepada penyidik terdekat atau kepada keucik/kepala gampong dan keluarga pelaku (4) Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syari'at islam kepada penyidik. Qanun Provinsi Aceh Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 20 tentang Qanun Maisir menyebutkan "*Maisir*" atau perjudian adalah kegiatan atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih, di mana pihak yang menang mendapatkan bayaran. Oleh karena itu maisir adalah perbuatan yang sangat dilarang baik oleh Agama maupun oleh Negara. Perbuatan maisir adalah perbuatan sia-sia dan dapat membawa pengaruh yang negatif dalam kehidupan bermasyarakat. Skripsi ini dibuat untuk menjawab dua pertanyaan penelitian, Apakah tugas dan fungsi Wilayahul Hisbah dalam penegakan Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir di Aceh Tamiang telah berjalan secara efektif ? dan Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat terhadap tugas dan fungsi Wilayahul Hisbah dalam penegakan Qanun Nomor 13 tahun 2003 tentang maisir di Aceh Tamiang ?.

Metodologi yang digunakan Adalah metode lapangan (*field research*), Penelitian lapangan bertujuan untuk mendapat data Primer yang dilakukan dengan cara mewawancarai para responden dan informan yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menyimpulkan : (1) Tugas dan fungsi Wilayahul Hisbah dalam penegakan Syariat Islam masih belum efektif dalam mengajak masyarakat kepada kebijakan dan mencegah kemungkaran (*al-amru bi al-ma'ruf wa an-nahyu 'an almunkar*). hakikatnya fungsi ini juga dapat di jalankan oleh semua unsur yang terkait dengan penerapan Syariat Islam, termasuk objek hukum. namun karena Wilayahul Hisbah merupakan lembaga khusus yang dibentuk menangani tugas ini, maka merekalah yang berwenang dan bertugas mengajak kepada kebaikan adalah dasar dari pada Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tamiang dengan segala ketentuan pelaksanaannya sesuai dengan tujuan (maqashid) utama pelaksanaan Syariat Islam adalah memberikan kemaslahatan kepada manusia khususnya masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang (2) Hambatan yang dihadapi Wilayahul Hisbah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelaksanaan Syariat Islam terbatasnya berbagai pedoman bagi Anggota Wilayahul Hisbah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kurangnya Personil Wilayahul Hisbah di Wilayah Aceh Tamiang, kurangnya anggaran operasional dan sarana prasarana dan lambannya penetapan sanksi akibat masih ditemukannya oknum tertentu yang melindungi pelaku Maisir.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tugas Dan Fungsi Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Syariat Islam Di Kabupaten Aceh Tamiang (Studi Qanun No.13 Tahun 2003 Tentang Maisir)”**

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga, ide-ide, maupun pemikiran. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Seluruh Bapak/Ibu Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa yang telah banyak membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.

Semoga segala bantuan yang tidak ternilai harganya ini mendapat imbalan di sisi Allah SWT sebagai amal ibadah, Amin.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan-perbaikan ke depan. *Amin Yaa Rabbal ‘Alamiin*

Langsa, 06 Mei 2015

Penulis,

JHONI AKBAR

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Tinjauan Pustaka.....	5
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II: LANDASAN TEORETIS TENTANG TUGAS DAN FUNGSI WILAYATUL HISBAH DALAM PENEGAKAN QANUN MAISIR	
A. Sejarah Pelaksanaan Syariat Islam Di Provinsi Aceh.....	9
B. Pengertian Tugas,Fungsi Dan Wewenang Wilayatul Hisbah....	23
1. Tugas-tugas wilayatul hisbah.....	24
C. Pengertian Dan Sanksi Terhadap Maisir.....	27
D. Wilayatul Hisbah Dan Sanksi Terhadap Maisir di Beberapa Negara.....	43

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Sumber Data.....	51
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	52
C. Definisi Operasional Variabel.....	52
D. Lokasi dan Populasi Penelitian.....	52
E. Teknik Menentukan Sampel Penelitian.....	53
F. Teknik Menganalisis Data.....	54

**BAB IV: TUGAS DAN FUNGSI WILAYATUL HISBAH DALAM
PENEGAKAN QANUN MAISIR DI KABUPATEN ACEH
TAMIANG**

A. Tugas dan Fungsi Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Qanun No 13 Tahun 2003 Tentang Maisir	55
B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penhambat Terhadap Tugas Dan Fungsi Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Qanun No 13 Tahun 2003 Tentang Maisir.....	64

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
C. Penutup.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syari'at adalah hukum agama (yang diamalkan menjadi perbuatan-perbuatan atau upacara) yang bertalian dengan Agama Islam. Atau dengan kata lain Syari'at adalah segala produk peraturan-peraturan yang dibuat atau yang akan di buat berdasarkan ajaran Agama Islam yang bersumber dari pada Al-Quran, Hadist dan Ijma' para Ulama.¹

Atas dasar pengertian Syari'at tersebut diatas maka keluarlah peraturan daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan syariat islam pada tanggal 25 juli 2000, di Provinsi Daerah Istimewa Aceh dengan ketentuan Syariat Islam yang akan dilaksanakan meliputi ;Aqideah, Ibadah, Muamalah, Akhlak, Pendidikan, Dakwah Islamiah, Baitul Mal, Kemasyarakatan, Syiar Islam, Pembelaan Islam, Qadha, Jinayat, Munakahat dan Mawaris.²

Implementasi dari kegiatan syari'at islam tersebut di atas sejak tahun 2000-2003, belum luas dan bermasyarakat, kemungkinan karena sosialisasi dan perda/qanun yang berhubungan dengan hal tersebut belum begitu lengkap dan menyeluruh dipahami oleh masyarakat.

Secara umum Syari'at Islam di bidang hukum memuat norma hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat/ bernegara dan norma hukum yang mengatur moral dan kepentingan individu yang harus ditaati oleh setiap orang . ketaatan

¹ Azman Usmanuddin, Nabhani; *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*, (Langsa: Yayasan Pembangunan Aceh Darussalam, 2010), hal.5.

² *Ibid.*

terhadap norma hukum yang mengatur moral kualitas iman dan taqwa atau hati nurani seseorang, juga disertai adanya sanksi duniawi dan ukhrawi terhadap orang yang melanggarnya.

Berdasarkan keputusan gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor 01 tahun 2004 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Wilayatul Hisbah, didalam pasal 4 Wilayatul Hisbah mempunyai tugas dan fungsi :

- (1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam
- (2) Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan di bidang syari'at Islam
- (3) Pada saat tugas pembinaan mulai dilakukan, muhtasib perlu memberitahukan hal itu kepada penyidik terdekat atau kepada keucik/kepala gampong dan keluarga pelaku
- (4) Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam kepada penyidik.³

Qanun Provinsi Aceh Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 20 tentang Qanun Maisir menyebutkan "*Maisir*" atau perjudian adalah kegiatan atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih, di mana pihak yang menang mendapatkan bayaran. Oleh karena itu maisir adalah perbuatan yang sangat dilarang baik oleh Agama maupun oleh Negara. Perbuatan maisir adalah

³ Saleh Suhaidy, *Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/Qanun Instruksi Gubernur Edaran Gubernur*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2005), hal.396.

perbuatan sia-sia dan dapat membawa pengaruh yang negatif dalam kehidupan bermasyarakat.⁴

Pasal 3 Qanun Nomor 13 Tahun 2003 “ tentang Maisir rmenyebutkan Tugas dan Fungsi Wilayatul Hisbah (WH) dibidang penegakan Qanun Maisir untuk melaksanakan Syariah Islam secara kafah“

- (1) Memelihara dan melindungi harta benda/kekayaan;
- (2) Mencegah anggota mayarakat melakukan perbuatan yang mengarah kepada maisir;
- (3) Melindungi masyarakat dan pengaruh buruk yang timbul akibat kegiatan dan/atau perbuatan maisir;
- (4) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan maisir.

Lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) menyebutkan "setiap orang atau badan hukum atau badan usaha dilarang menyelenggarakan dan atau memberikan fasilitas kepada orang yang akan melakukan perbuatan maisir, dalam ayat (2) setiap orang atau badan hukum atau badan usaha dilarang menjadi pelindung terhadap perbuatan maisir. Bila ketentuan tersebut dilanggar akan dikenakan ancaman dengan 'uqubat cambuk di depan umum paling banyak dua belas kali atau denda sebanyak Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).⁵ Meskipun ketentuan perundang-undangan atau Qanun telah melarangnya dan akan dikenakan ancaman dengan `uqubat atau denda, dari hasil pengamatan di lapangan diketahui bahwa dalam kenyataannya penegakan Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang perbuatan

⁴ *Ibid*.hal.271.

⁵ *Ibid*.hal.272.

maisir belum berjalan sesuai yang di inginkan sehingga perbuatan maisir masih merajalela.

Di Kabupaten Aceh Tamiang masih banyak ditemui pelaku-pelaku maisir. hal ini menunjukkan bahwa tugas dan fungsi WH masih belum maksimal

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah tugas dan fungsi Wilayatul Hisbah dalam penegakan Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir di Aceh Tamiang telah berjalan secara efektif ?
2. Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat terhadap tugas dan fungsi Wilayatul Hisbah dalam penegakan Qanun Nomor 13 tahun 2003 tentang maisir di Aceh Tamiang ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Ruang lingkup pembahasan dalam penulisan skripsi ini merupakan suatu kajian dari hukum Tata Negara. Pembahasannya akan di batasi khusus hanya menyangkut tentang tinjauan yuridis mengenai Tugas Dan Fungsi Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Qanun Maisir Di Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2013-2014.

Adapun yang tujuan diadakan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan efektif tidaknya tugas dan fungsi WH dalam pelaksanaan Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor penghambat terhadap tugas dan fungsi WH dalam pelaksanaan Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.

D. Penjelasan istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa istilah, diantaranya sebagai berikut :

1 Tugas

Tugas adalah sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan⁶.

2. Fungsi

Fungsi adalah kegunaan dari sesuatu, baik berupa barang maupun jasa. sebuah tanda akan selalu berfungsi apabila di hubungkan dengan sesuatu yang lain.⁷

3. Wilayatul Hisbah

Wilayatul Hisbah adalah lembaga atau badan yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang ada yang harus di ikuti, cara menggunakan dan menaati peraturan serta tindakan yangharus dihindari karena bertentangan dengan peraturan.⁸

E. Tinjauan pustaka

⁶ Penyusunan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 964.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

Penelitian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi wilayatul hisbah dalam penegakan syariat islam memang bukan yang pertama kali. Sebelumnya pun juga pernah ada penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut. Akan tetapi untuk menghindari terjadinya duplikasi, maka penelitian ini ditekankan pada 2 kajian inti yang menjadi pokok permasalahan yaitu; *pertama* tentang Tugas Dan Fungsi Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Qanun No 13 Tahun 2003 Tentang Maisir dan yang *kedua* tentang Factor-Factor yang menjadi penghambat terhadap Tugas dan Fungsi Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Qanun No 13 Tahun 2003 Tentang Maisir.

Hasil penelusuran penulis di perpustakaan iain zawiyah cot kala langsa maupun tempat lain , penulis menemukan banyak skripsi dan buku yang membahas persoalan tentang wilayatul hisbah baik yang membahas secara umum, maupun secara spesifik namun, penulis belum (Tidak) menemukan satupun skripsi yang membahas tentang Tugas dan Fungsi Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Syariat Islam di Aceh Tamiang (Studi Qanun No. 13 Tahun 2003 Tentang Maisir).

Adapun skripsi dan buku yang berkaitan dengan hal tersebut adalah:

1. Skripsi “ *Mencari Keadilan Tentang Hukum Bergerak di Qanun di Aceh Besar (Studi Qanun No. 11,12,13 dan 14 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam)*”. Skripsi yang di susun oleh Ahmad Munif ini mengulas tentang penerapan Qanun No.11,12,13,dan 14 tentang pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Besar

2. Buku “ *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh* “ karangan Azman Usmanudin. Buku ini menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.
3. Buku “ *Wilayatul Hisbah Polisi Pamong Praja dengan Kewenangan Khusus Di Aceh* “ karangan Alyasa Abubakar. Buku ini menjelaskan tentang Tugas dan Fungsi Wilayatul Hisbah di Aceh dan kewenangan-kewenangan nya.
4. Buku “ *Apakah Judi Itu* “ karangan Ibrahim Hossen. Buku ini menjelaskan tentang pengertian judi dan hukuman – hukuman bagi pelaku judi.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran umum tentang isi skripsi ini maka akan diuraikan mengenai sistematika pembahasannya. Skripsi ini dibagi dalam empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab.

Bab I merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini akan dikemukakan mengenai latar belakang permasalahan, ruang lingkup penelitian dan tujuan penulisan, metode penulisan dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bab teoretis yang berjudul landasan teoretis tentang tugas dan fungsi wilayatul hisbah dalam penegakan qanun maisir. Pada bab ini akan diuraikan mengenai landasan teoretis sejarah Wilayatul Hisbah di Provinsi Aceh, ketentuan hukum tentang tugas dan fungsi wilayatul hisbah dalam penegakan qanun maisir di Provinsi Aceh .

Bab III merupakan Metode Penelitian yang digunakan oleh Penulis. Dalam bab ini diuraikan tentang jenis penelitian dan sumber data, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulandata,operasionalisasi variabel penelitian serta teknik analisis data yang digunakan oleh penulis.

Bab IV merupakan bab hasil penelitian yang berjudul penelitian tugas dan fungsi wilayahul hisbah dalam penegakan Syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tamiang (Studi Qanun No. 13 Tahun 2003 Tentang Maisir) . Di dalam bab ini di kemukakan mengenai tugas dan fungsi Wilayahul Hisbah dalam penegakan Qanun Maisir. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat terhadap tugas dan fungsi WH dalam penegakan Qanun Nomor 13 tahun 2003 tentang maisir.

Bab V merupakan bab penutup. Dalam bab ini di kemukakan kesimpulan yang diambil dari hasil pembahasan dan juga diberikan beberapa saran.